



LAPORAN KINERJA 2022

Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya dan Ekosistem

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
KATA PENGANTAR	4
RINGKASAN EKSEKUTIF	6
BAB I PENDAHULUAN	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. CAPAIAN KINERJA	20
B. REALISASI ANGGARAN	38
BAB IV PENUTUP	40
LAMPIRAN	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pagu Anggaran Setditjen KSDAE Sebelum dan Sesudah	17
Tabel 2. Pagu Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2022	18
Tabel 3. Komponen Dukungan Manajemen Direktorat Teknis 2022	19
Tabel 4. Capaian Kinerja Setditjen KSDAE tahun 2022	20
Tabel 5. Target dan capaian Setditjen KSDAE 2020-2024.....	20
Tabel 6. Pagu dan realisasi anggaran Setditjen KSDAE 2022 .	38



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas selama tahun 2022 dalam mewujudkan reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE sesuai indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Indikator dan target kinerja yang diperjanjikan dalam periode tahun 2022 yaitu nilai kinerja reformasi birokrasi (nilai SAKIP) Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 78,5 poin, opini WTP atas Laporan Keuangan dan level maturitas sistem pengendalian intern pemerintah pada level 3.

Dengan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil serta kinerja organisasi yang efektif dan efisien yang masih di tengah masa pandemi Covid 19, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE dapat mencapai ketiga target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pertama, evaluasi atas penerapan SAKIP yang dilakukan oleh APIP, Direktorat Jenderal KSDAE memperoleh nilai sebesar 79,12, dengan kategori A (Memuaskan), kedua, atas dukungan seluruh Satuan Kerja dalam kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan tindak lanjut penyelesaian atas temuan-temuan, Laporan Keuangan Direktorat Jenderal KSDAE mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ketiga, level maturitas SPIP Direktorat Jenderal KSDAE adalah 3,910 berada pada tingkat 3 yang artinya capaian kinerja Direktorat

Jenderal KSDAE sudah baik dan strategi pencapaian kinerja telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan.

Kami menyadari bahwa target-target kinerja yang telah dicapai tersebut masih terdapat kekurangan. Kedepan, seiring dengan penetapan target renstra 2020-2024 dan menghadapi tantangan dinamika pengelolaan kawasan konservasi, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE akan terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan keuangan dalam mewujudkan pencapaian target kinerja.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pegawai lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE dan semua pihak yang telah berperan dan mendukung pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal KSDAE. Saran dan masukan untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang sangat kami harapkan. Semoga Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE dapat mewujudkan reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jakarta, 20 Januari 2023
Sekretaris Direktorat Jenderal,

**Suharyono, SH, M.Si, M.Hum
NIP. 19670401 199403 1 003**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2020-2024.

Salah satu program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2022 adalah program dukungan manajemen dengan sasaran program meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif, dan berpelayanan prima. Untuk mencapai sasaran program tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE bertanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal KSDAE dengan sasaran kegiatan yaitu terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Indikator dan target kinerja kegiatan yang diperjanjikan dalam periode tahun 2022 yaitu nilai kinerja reformasi birokrasi (nilai SAKIP) Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 79,00 poin, opini WTP atas Laporan Keuangan dan level maturitas sistem pengendalian intern pemerintah pada level 3.

Pada indikator kinerja pertama, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2022 oleh Tim Inspektorat Jenderal KLHK, Direktorat Jenderal KSDAE memperoleh nilai 79,12 atau 100,15% jika dibandingkan target 79,00. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan pada 4 komponen manajemen kinerja, dimana nilai setiap komponen yaitu Perencanaan kinerja memperoleh nilai 24,18 dari 30, Pengukuran kinerja memperoleh nilai 20,88 dari 30, Pelaporan kinerja memperoleh nilai 10,71 dari 15, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 23,33 dari 25.

Pada indikator kinerja kedua, predikat WTP diperoleh atas dukungan seluruh satker lingkup Direktorat Jenderal KSDAE dalam menjaga ketertiban dan ketaatan dalam pengelolaan keuangan negara, keandalan informasi laporan keuangan yang disajikan Direktorat Jenderal KSDAE dan tindak lanjut penyelesaian atas temuan-temuan, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 100%.

Pada indikator ketiga, maturitas SPIP, sesuai dengan kesepakatan dengan Inspektorat Jenderal KLHK bahwa nilai yang digunakan sebagai capaian adalah nilai Penilaian Mandiri Maturitas KLHK, dengan nilai 3,50 masuk pada level 3, sehingga capaian kinerja maturitas SPIP adalah 100%. Pada level 3 ini berarti bahwa capaian kinerja sudah baik dan strategi pencapaian kinerja telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2022, anggaran yang digunakan adalah sebesar Rp. 67.588.690.323,- atau 93,26% dari pagu Rp. 72.466.355.000,-.

GLOSARIUM

AA	: Automatic Adjusment
ASN	: Aparatur Sipil Negara
ANJAB	: Analisis Jabatan
BA BUN	: Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
BBTN	: Balai Besar Taman Nasional
BTN	: Balai Taman Nasional
BBKSDA	: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam
BKSDA	: Balai Konservasi Sumber Daya Alam
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
CB	: Cagar Biosfer
Ditjen	: Direktorat Jenderal
DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran
DIM	: Daftar Investasi Masalah
Gakkum	: Penegakan Hukum
HLN	: Hibah Luar Negeri
HOK	: Hari Orang Kerja
IEPK	: Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
IKN	: Ibu Kota Negara
IKP	: Indikator Kinerja Program
KP	: Kenaikan Pangkat
KSDAE	: Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem
KKOTL	: Kepegawaian, Keuangan dan Organisasi Tata Laksana
LHK	: Lingkungan Hidup Kehutanan
LHKPN	: Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
LHKASN	: Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
LKJ	: Laporan Kinerja
MRI	: Manajemen Resiko Indeks
PEHKT	: Program Evaluasi Hukum dan Kerjasama Teknik
PJLKK	: Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
PK	: Perjanjian Kinerja
PKK	: Pengelolaan Kawasan Konservasi
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Polhut	: Polisi Hutan
PPNPN	: Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PSPK	: Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan
PSM	: Peran Serta Masyarakat
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
Renja	: Rencana Kerja
RI	: Republik Indonesia
RKK	: Perencanaan Kawasan Konservasi
RKP	: Rencana Kerja Program

RPP	: Rancangan Peraturan Pemerintah
RUU	: Rancangan Undang-undang
RO	: Rincian Output
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
SIDAK	: Sistem Informasi dan Data Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
SK	: Surat Keputusan
SKRT	: Sistem Komunikasi Radio Terpadu
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SOTK	: Standar Operasional Teknis Kerja
TSL	: Tumbuhan dan Satwa Liar
UAKPA	: Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
UAPPA-W	: Akuntansi Pembantu Pengguna Anggota Wilayah
UAPPA-E1	: Akuntansi Pengguna Anggaran Eselon I
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
WBK	: Wilayah Bebas Korupsi

BAB I

PENDAHULUAN

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak. Salah satu langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mengamanatkan agar Instansi Pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Melalui penerapan SAKIP, sistem manajemen yang berorientasi pada hasil ini diharapkan dapat mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, dan responsif.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan dan melaporkan kinerja selama tahun 2022, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE sebagai unit eselon II telah menyusun Laporan Kinerja (LKJ) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2022 adalah program dukungan manajemen dengan sasaran program meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif, dan berpelayanan prima. Untuk mencapai sasaran program tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE bertanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal KSDAE dengan sasaran kegiatan yaitu terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Indikator dan target kinerja kegiatan yang diperjanjikan dalam periode tahun 2022 yaitu nilai kinerja reformasi birokrasi (nilai SAKIP) Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 79,00 poin, opini WTP atas Laporan Keuangan dan level maturitas sistem pengendalian intern pemerintah pada level 3.

Dalam mewujudkan target kinerja tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE menghadapi berbagai kendala/permasalahan, dan tantangan, antara lain: 1) penyesuaian atas penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional; 2) penyelesaian perubahan jabatan administrasi pada Balai Besar TN/KSDA; 3) penyelesaian revisi UU Nomor 5 tahun 1990; 4) reviu Peraturan Menteri LHK bidang KSDAE; 5) penyelesaian status

tenaga non ASN; 6) pengelolaan BMN untuk mendukung pengelolaan ditingkat tapak; 7) tindak lanjut atas hasil audit yang masih belum terselesaikan; 8) belum dilakukannya pengisian pejabat struktural pada beberapa UPT.

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE adalah sebesar Rp158.918.767.000,-. Alokasi anggaran tersebut mengalami beberapa kali proses refocusing untuk memenuhi permintaan kekurangan belanja pegawai Ditjen Gakkum, penghapusan blokir AA belanja pegawai, perubahan belanja pegawai ke 002, dan Realokasi ke BA BUN (penghapusan blokir) sehingga menjadi sebesar Rp.142.410.257.000,-. Anggaran belanja yang di refocusing sebesar Rp.16.508.510.000,- adalah perjalanan dinas, paket meeting, dan anggaran yang belum di kontrakkan. Namun demikian, refocusing anggaran tersebut tidak mengganggu pencapaian target kinerja dan belanja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE seperti belanja pegawai, belanja operasional dan belanja non operasional untuk pelaksanaan dukungan manajemen Direktorat Jenderal KSDAE.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta pencapaian target kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE didukung oleh 146 pegawai terdiri dari 102 orang ASN dan 44 orang non ASN (PPNPN) yang tersebar di 2 Bagian, yaitu Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik (PEHKT) dan Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (KKOTL).

STRUKTUR ORGANISASI

SESUAI DENGAN PERMEN LHK NO.15 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KLHK, SUSUNAN ORGANISASI SETDITJEN KSDAE YAITU:

SEKDIRITJEN KSDAE



BAGIAN PEHKT



BAGIAN KKOTL



SUBBAG TU



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUMBER DAYA MANUSIA

Sebaran Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE



TOTAL PEGAWAI
146



Bagian PEHKT		
Pegawai	:	44
ASN	:	34
PPNPN	:	10



Bagian KKOTL		
Pegawai	:	102
ASN	:	68
PPNPN	:	34

Jumlah Pegawai Sekretariat Jenderal KSDAE Berdasarkan Jenis Kelamin



Wanita
38,36%



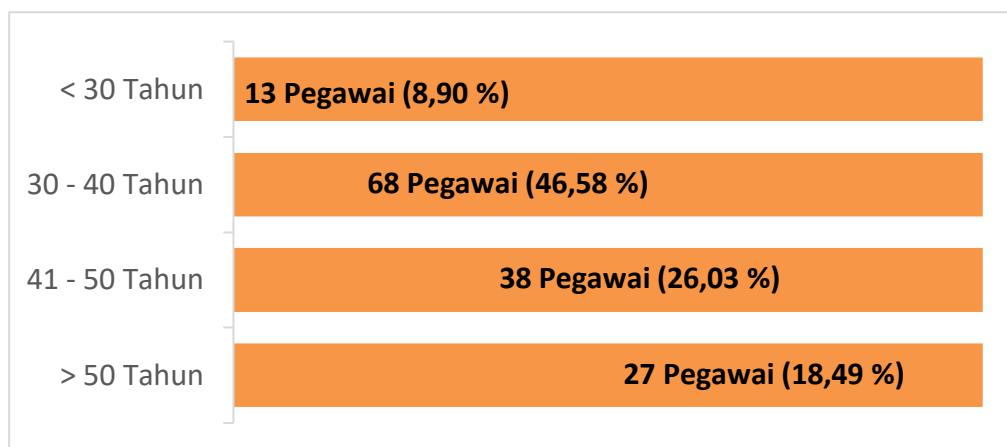
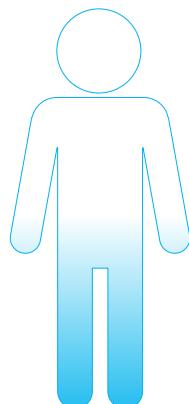
Laki-Laki
61,64%

Jumlah Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Berdasarkan Jabatan

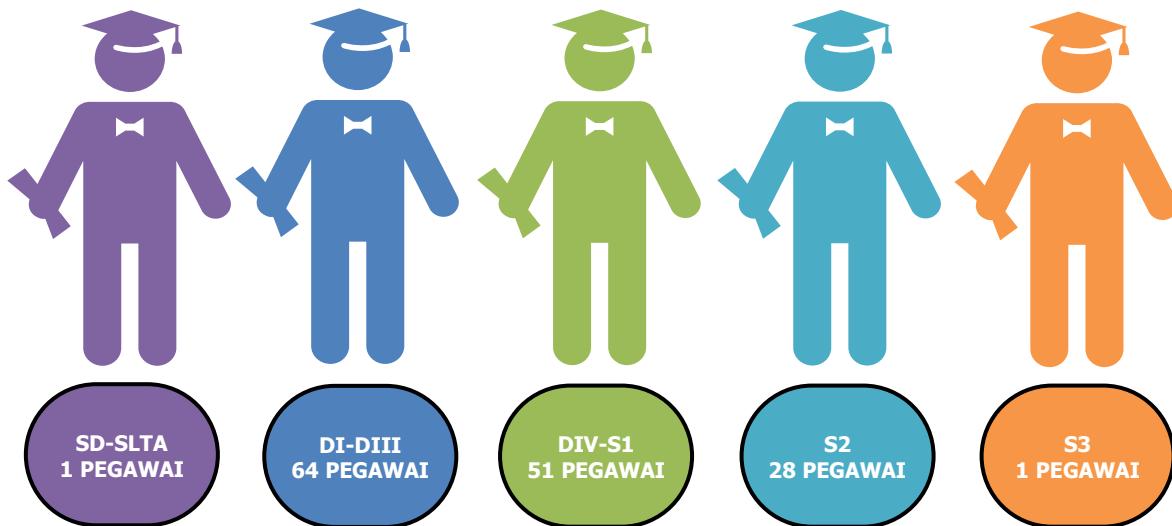
Jabatan	Jumlah Pegawai
<i>Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama</i>	1
<i>Pejabat Administrator (Eselon III)</i>	2
<i>Pejabat Pengawas (Eselon IV)</i>	1
<i>Jabatan Fungsional Analis Anggaran Ahli Muda</i>	1
<i>Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Madya</i>	1
<i>Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda</i>	2
<i>Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya</i>	1
<i>Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda</i>	1
<i>Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama</i>	3
<i>Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda</i>	1
<i>Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama</i>	2
<i>Jabatan Fungsional Pranata Humas Ahli Muda</i>	1
<i>Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda</i>	1
<i>Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama</i>	2
<i>Jabatan Fungsional Pranata Komputer Terampil</i>	2
<i>Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli Madya</i>	1
<i>Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli Muda</i>	3
<i>Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli Pertama</i>	3
<i>Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Mahir</i>	1
<i>Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Penyelia</i>	2
<i>Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya</i>	1
<i>Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda</i>	1
<i>Jabatan Fungsional Arsiparis Penyelia</i>	1
<i>Jabatan Fungsional Arsiparis Terampil</i>	2
<i>Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama</i>	1
<i>Analisis Advokasi Hukum</i>	2
<i>Analisis Kerjasama Teknik</i>	3
<i>Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</i>	4
<i>Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan</i>	1
<i>Analisis Rencana Program dan Kegiatan</i>	2
<i>Pengolah Data</i>	20
<i>Analisis Barang Milik Negara</i>	2
<i>Analisis Kelembagaan</i>	5
<i>Analisis Keuangan</i>	3
<i>Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur</i>	3
<i>Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan</i>	1
<i>Komandan Petugas Keamanan</i>	1
<i>Pengelola Surat</i>	1
<i>Pengelola data</i>	1
<i>Pengelola Barang Milik Negara</i>	1
<i>Petugas Keamanan</i>	1

<i>Jabatan</i>	<i>Jumlah Pegawai</i>
<i>Analis Tata Usaha</i>	2
<i>Bendahara</i>	2
<i>Pengadministrasi Umum</i>	4
<i>Teknisi Sarana dan Prasarana</i>	1
<i>Verifikator Keuangan</i>	2
<i>Pranata Laporan Keuangan</i>	2
<i>Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)</i>	44

Jumlah Pegawai Sekretariat Jenderal KSDAE Berdasarkan Kelas Umur



Jumlah Pegawai Sekretariat Jenderal KSDAE Berdasarkan Tingkat Pendidikan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Renstra Setditjen KSDAE 2020-2024

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024. Lingkup Ditjen KSDAE, pelaksanaan kegiatan pembangunan masih mengacu kepada visi, misi, tujuan pembangunan yang selaras dengan visi dan misi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Visi Direktorat Jenderal KSDAE	"Terwujudnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati untuk Kesejahteraan Masyarakat" yang mendukung "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".
Rumusan Misi Direktorat Jenderal KSDAE dan mendukung Misi KLHK	MEWUJUDKAN: Perlindungan keanekaragaman hayati yang berkualitas pemanfaatan TSL yang berkualitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi yang berkualitas manfaat hutan konservasi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat pengelolaan hutan konservasi yang lebih efektif tata kelola pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang baik
Tujuan Pembangunan Hutan Konservasi Direktorat Jenderal KSDAE	MENINGKATKAN: Kualitas ruang perlindungan keanekaragaman hayati baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi kualitas pemanfaatan TSL dalam mendukung peningkatan nilai ekspor kualitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi manfaat hutan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat pengelolaan hutan konservasi yang efektif tata kelola pembangunan hutan konservasi
Sasaran Direktorat Jenderal KSDAE	MENINGKATNYA: Ruang perlindungan keanekaragaman hayati nilai ekspor pemanfaatan TSL pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan TSL secara lestari ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi efektivitas pengelolaan hutan konservasi tata kelola yang baik di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE
Program	Dukungan Manajemen dengan sasaran program: meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima
Kegiatan	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal KSDAE dengan sasaran kegiatan: terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target pada akhir tahun 2024: 1. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 80,00 (Poin), 2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan (opini WTP) 3. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencapai level 4.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2022

Kegiatan		Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal KSDAE	
Sasaran Kegiatan		Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (SAKIP) Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 80,00 (Poin)	79,00 Poin	
	Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan (Opini WTP)	Opini WTP : 1	
	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level SPIP)	Level SPIP : 3	
Output	1. 5419.EBA.962 - Layanan Umum 2. 5419.EBA.994 - Layanan Perkantoran 3. 5419.EBB.951 - Layanan Sarana Internal 4. 5419.EBB.971 - Layanan Prasarana Internal		
Anggaran	Rp. 62.501.374.000,-		

Rencana Kerja tahun 2022 Berdasarkan Rincian Output dan Komponen

Rincian Output	Target	Komponen	Target
Layanan Umum	1 Layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Program, Anggaran, Evaluasi, Data dan Informasi - Hukum dan Kerjasama Teknik - Pengelolaan Kepegawaian, Jabfung, dan Ortala - Pengelolaan Keuangan dan Umum - Dukungan Manajemen Direktorat Perencanaan KK - Dukungan Manajemen Direktorat Pengelolaan KK - Dukungan Manajemen Direktorat KKSG - Dukungan Manajemen Direktorat PJLKK - Dukungan Manajemen Direktorat BPPE 	25 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 7 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen
Layanan Perkantoran	1 Layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Gaji dan Tunjangan - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 	12 Layanan 12 Layanan
Layanan Sarana Internal	1 Unit	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi - Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 	20 Unit 23 Unit
Layanan Prasarana Internal	1 Unit	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan 	3 Unit Bangunan

Pada rincian output layanan umum masih terdapat komponen dukungan manajemen direktorat yang mendukung pelaksanaan kegiatan di Direktorat Teknis lingkup Ditjen KSDAE. Pelaksanaan dukungan tersebut dilakukan oleh subbagian tata usaha masing-masing direktorat teknis lingkup Ditjen KSDAE.

Pagu Anggaran 2022

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen pada Kantor Pusat tahun 2022, pagu anggaran mengalami perubahan/penyesuaian karena kebijakan AA (*Automatic Adjusment*) dan juga revisi sebanyak 14 kali (5 di Kanwil dan 9 di DJA) pada tahun 2022. Kebijakan *Automatic Adjusment* dan revisi anggaran terjadi sebanyak 2 kali yang mengakibatkan anggaran Dukungan Manajemen Kantor Pusat mengalami pengurangan dari pagu anggaran semula yang telah ditetapkan. Pagu Semula dan Menjadi Kantor Pusat Tahun 2022 seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Pagu Anggaran Setditjen KSDAE Sebelum dan Sesudah

Kode	Kegiatan	Pagu semula	Pagu menjadi
5419	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	109.670.624.000	87.486.145.000
5419.EBA	<i>Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>	106.636.091.000	83.065.546.000
5419.EBA.962	Layanan Umum	22.590.953.000	19.728.742.000
051	Program, Anggaran, Evaluasi, Data, dan Informasi	5.357.777.000	5.803.286.000
052	Hukum dan Kerjasama Teknik	3.351.820.000	2.897.111.000
053	Pengelolaan Kepegawaian, Jabfung, dan Ortala	3.262.560.000	2.646.121.000
054	Pengelolaan Keuangan dan Umum	5.938.796.000	4.278.124.000
055	Dukungan Manajemen Direktorat Perencanaan KK	880.000.000	770.000.000
056	Dukungan Manajemen Direktorat Pengelolaan KK	850.000.000	723.000.000
057	Dukungan Manajemen Direktorat KKHSG	1.200.000.000	1.062.100.000
058	Dukungan Manajemen Direktorat PJLKK	1.000.000.000	879.800.000
059	Dukungan Manajemen Direktorat BPPE	750.000.000	669.200.000
5419.EBA.994	Layanan Perkantoran	84.045.138.000	63.336.804.000
001	Gaji dan Tunjangan	67.578.978.000	42.664.949.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	16.466.160.000	20.671.855.000
5419.EBB	<i>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</i>	3.034.533.000	4.420.599.000
5419.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.200.000.000	1.566.186.000

Kode	Kegiatan	Pagu semula	Pagu menjadi
996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	159.500.000	217.000.000
997	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1.040.500.000	1.349.186.000
5419.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.834.533.000	2.854.413.000
998	Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	1.834.533.000	2.854.413.000

Berdasarkan pagu anggaran tahun 2022, alokasi anggaran Dukungan Manajemen sebesar Rp. 87.486.145.000,- dan pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE adalah Rp. 72.466.355.000,-, dengan rincian seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2. Pagu Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2022

No	Rincian Output	Komponen	Pagu Anggaran (Rp)
1	Layanan Umum	Penyusunan Program, Anggaran, Evaluasi, Data dan Informasi	5.803.286.000
		Hukum dan Kerjasama Teknik	2.897.111.000
		Pengelolaan Kepegawaian, Jabfung, dan Ortala	2.646.121.000
		Pengelolaan Keuangan dan Umum	4.278.124.000
2	Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	42.664.949.000
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	11.487.851.000
		- Belanja Operasional Ditjen dan Setditjen KSDAE	11.487.851.000
3	Layanan Sarana Internal	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0
		Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	543.000.000
		- Pengadaan Peralatan Setditjen	543.000.000
4	Layanan Prasarana Internal	Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	2.145.913.000
		- Penataan Ruangan Ditjen KSDAE	2.145.913.000
JUMLAH			72.466.355.000

Dalam pelaksanaan Rincian Output layanan umum kantor pusat, terdapat komponen dukungan manajemen yang mendukung pelaksanaan dukungan manajemen di masing-masing Direktorat Teknis lingkup Ditjen KSDAE, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3. Komponen Dukungan Manajemen Direktorat Teknis 2022

No	Rincian Output	Komponen	Pagu Anggaran (Rp)
1	Layanan Umum	Dukungan Manajemen Direktorat Perencanaan KK	770.000.000
		Dukungan Manajemen Direktorat Pengelolaan KK	723.000.000
		Dukungan Manajemen Direktorat KKHSG	1.062.100.000
		Dukungan Manajemen Direktorat PJLKK	879.800.000
		Dukungan Manajemen Direktorat BPPE	669.200.000
	Jumlah		4.104.100.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022, dengan mengacu kepada perjanjian kinerja tahun 2022 antara Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE dengan Direktur Jenderal KSDAE. Berikut merupakan capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2022 dan juga capaian indikator kinerja kegiatan Setditjen KSDAE 2020-2024.

Tabel 4. Capaian Kinerja Setditjen KSDAE tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Target dan Capaian Kinerja Tahun 2022		Capaian Kinerja Setditjen KSDAE Tahun 2022
IKK 1	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE (Poin)	Target - 79,00 Poin Capaian - 79,12 Poin	100,15 %	100,05 %
IKK 2	Opini WTP atas Laporan Keuangan (Opini WTP)	Target - Opini WTP : 1 Capaian - 1	100 %	
IKK 3	Level Maturitas SPIP (Level Maturitas)	Target - Level 3 Capaian - Level 3 (Nilai maturitas : 3,50)	100 %	

Tabel 5. Target dan capaian Setditjen KSDAE 2020-2024

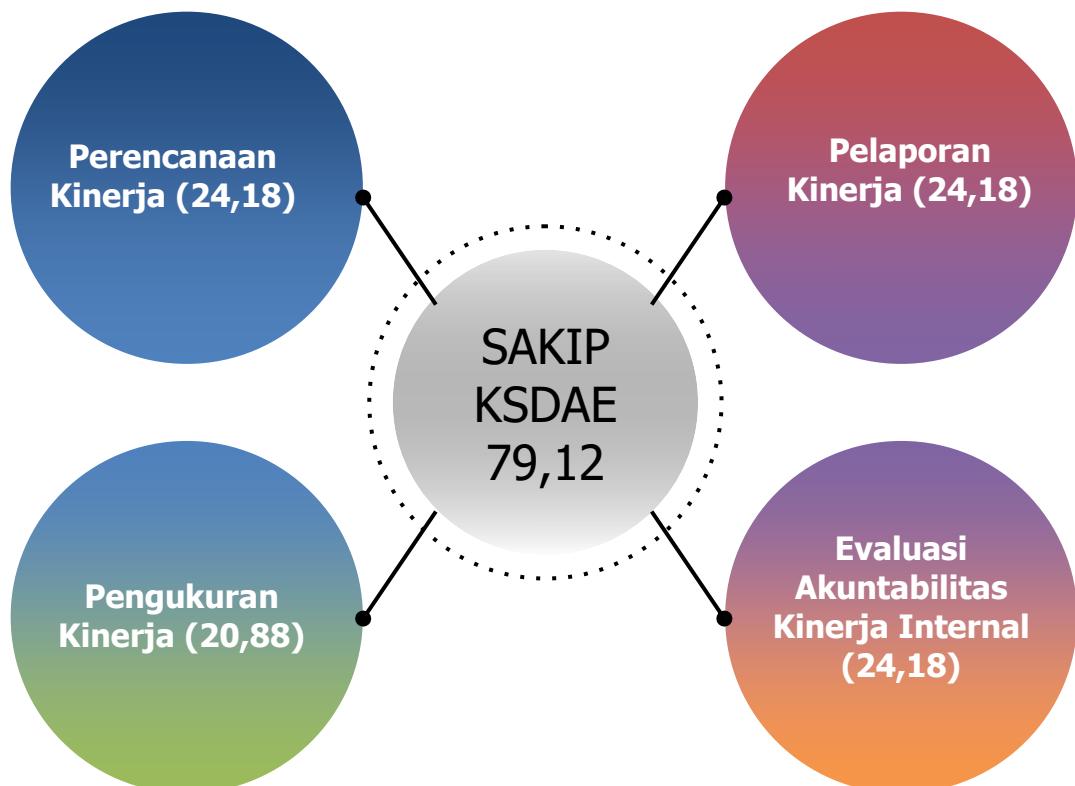
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Target dan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024					
		2020	2021	2022	2023	2024	
IKK 1	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE (Poin)	Target	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00
		Capaian	79,37	80,02	79,12	-	-
IKK 2	Opini WTP atas Laporan Keuangan (Opini WTP)	Target	1	1	1	1	1
		Capaian	1	1	1	-	-
IKK 3	Level Maturitas SPIP (Level Maturitas)	Target	3	3	3	4	4
		Capaian	3 (3,358)	3 (3,910)	3 (3,50)	-	-

Indikator Kinerja Kegiatan I

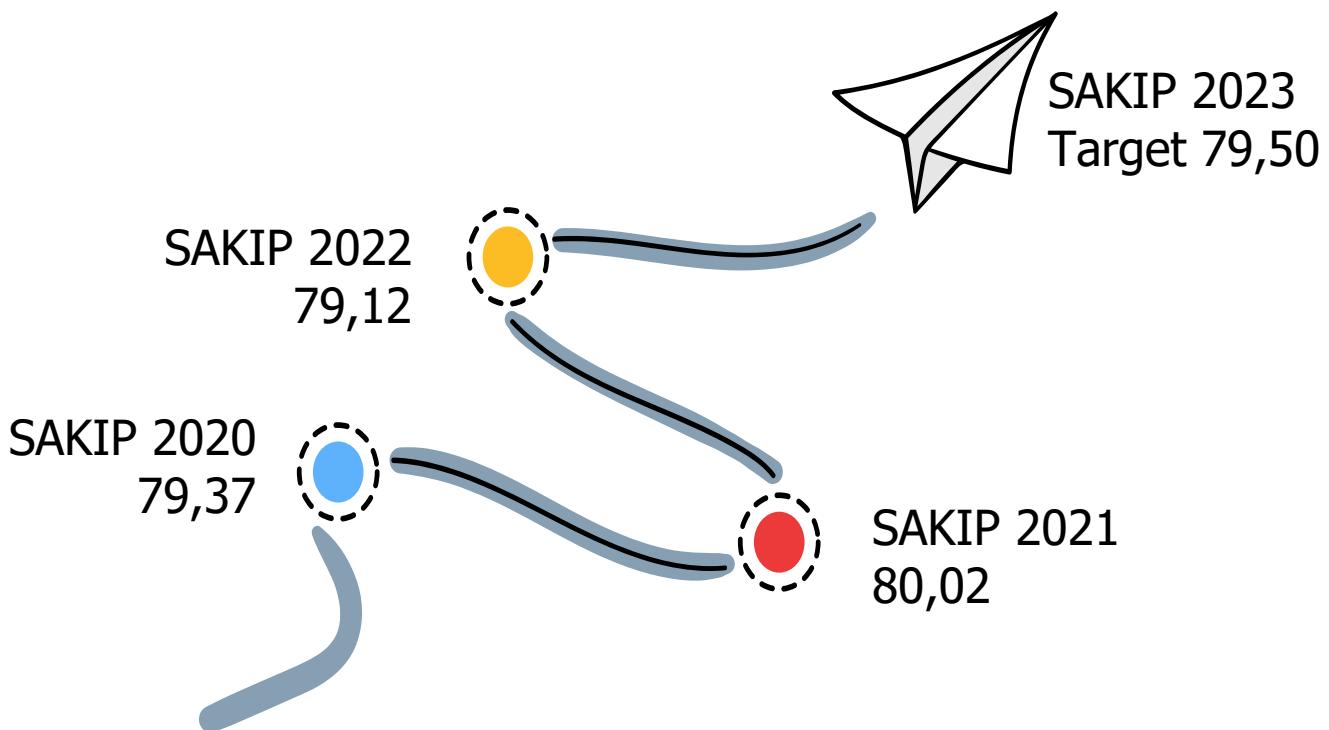
Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 80,00 Poin

Berdasarkan laporan hasil evaluasi tim Inspektorat Jenderal KLHK Nomor: SP.86/ITJEN/ITWIL.1/RHS/WAS.3/5/2022 tanggal 24 Mei 2022 perihal laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2021 Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, secara keseluruhan nilai atas implementasi SAKIP Ditjen KSDAE yaitu 79,12 dengan nilai BB (sangat baik).

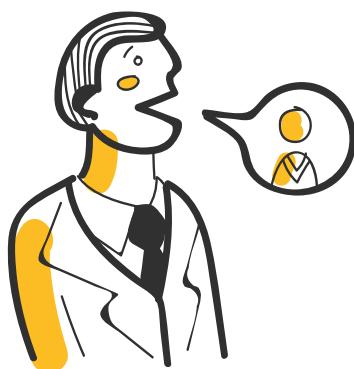
Pada tahun 2022 telah dilakukan evaluasi SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE terhadap 4 komponen akuntabilitas kinerja yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dengan mengambil sampel sebanyak 3 (tiga) unit kerja. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Direktorat Jenderal KSDAE mendapatkan nilai SAKIP sebesar **79,12 dengan kategori BB (Sangat Baik)**, dengan capaian kinerja sebesar **100,15%** dari target nilai SAKIP tahun 2022 sebesar 79,0.



Perjalanan Nilai SAKIP Ditjen KSDAE 2020-2022



Nilai SAKIP Ditjen KSDAE mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi masih tetap capaian kinerja diatas 100%. Komponen perencanaan kinerja dan komponen pelaporan kinerja menurun dibandingkan tahun 2021, sedangkan komponen pengukuran kinerja dan evaluasi internal meningkat dibandingkan tahun 2021.



Permasalahan implementasi Ditjen KSDAE:

1. Target yang ditetapkan pada IKK 1, IKK 3 dan IKK 4 memiliki nilai target yang sama mulai 2020 s/d 2023, sehingga tidak bersifat *continuous improvement* dan tidak menantang (pada Direktorat PJLKK).
2. Laporan Kinerja baru dipublikasikan pada tanggal 31 Maret 2022, sehingga diperlukan penetapan tata waktu terkait publikasi dokumen Perencanaan dan Pelaporan pada website Direktorat PJLKK : <https://jasling.menlhk.go.id>.
3. Terdapat perbedaan nilai target kinerja tahun 2021 pada 4 IKP dari 7 IKP yang tercantum dalam PK dan pencapaian kinerja LKj dengan Renstra dan Renja (pada Ditjen KSDAE).
4. Pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).



Rekomendasi Ditjen KSDAE:

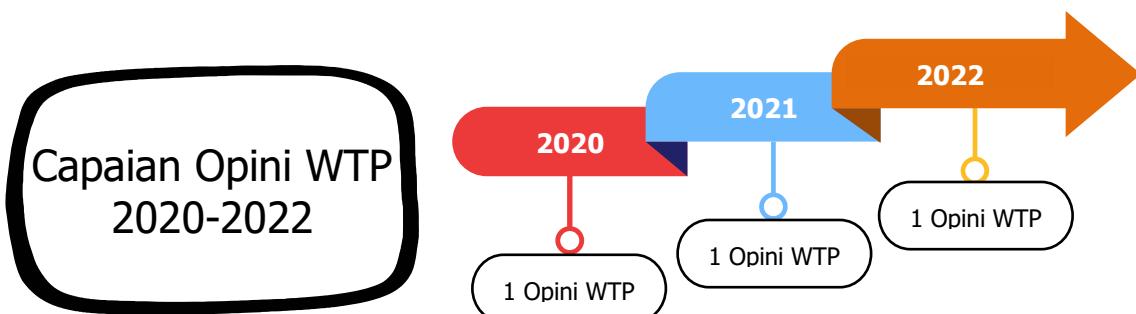
1. Melakukan penelaahan atas metode verified atas capaian IKK yang tertuang dalam Rencana Strategis 2020-2024, dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing IKK dan capaiannya.
2. Menyusun SOP terkait tata waktu publikasi Perencanaan Kinerja dan Laporan Kinerja melalui Website Direktorat PJLKK.
3. Lebih cermat dalam menetapkan nilai target kinerja tahunan dalam Perjanjian Kinerja (PK) agar selaras dengan Renja dan Renstra Ditjen KSDAE.
4. Dalam pengukuran capaian kinerja agar dapat menggunakan aplikasi yang sudah tersedia ataupun dibuat oleh pihak lain.

Indikator Kinerja Kegiatan II Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan (Opini WTP)

Pada tahun 2022 telah disusun laporan keuangan periode tahun anggaran 2021, Semester I tahun anggaran 2022 dan Triwulan III tahun 2022. Kualitas laporan keuangan yang baik adalah yang dapat menyampaikan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan negara dan laporan keuangan Ditjen KSDAE memberikan kontribusi positif pada opini BPK RI terhadap laporan keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Opini WTP diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Selama 4 tahun terakhir, KLHK telah mendapatkan predikat Opini WTP. Perolehan opini WTP dari BPK tersebut membuktikan tidak ada pelanggaran hukum atas pengelolaan keuangan dan anggaran telah direalisasikan tertib secara administrasi melalui material yang cukup dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Atas pencapaian Opini WTP ini, maka capaian kinerja ini adalah **100%** sesuai dengan target yang ditetapkan.

Predikat WTP ini diperoleh atas dukungan seluruh satker lingkup Ditjen KSDAE dalam menjaga ketertiban dan ketaatan dalam pengelolaan keuangan negara. Keandalan informasi laporan keuangan yang disajikan oleh Ditjen KSDAE disusun mulai dari satuan kerja Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), melalui Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) sampai pada kompilasi Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA E1). Menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI baik tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya terus dilakukan oleh Ditjen KSDAE dalam rangka mendukung tindak lanjut yang ditargetkan oleh BPK RI.



Indikator Kinerja Kegiatan III Level Maturitas SPIP (Level Maturitas)

Tingkat maturitas SPIP merupakan tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tingkat maturitas menunjukkan kualitas proses pengendalian terintegrasi dalam pelaksanaan tindakan manajerial dan kegiatan teknis instansi pemerintah. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan gambaran mengenai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah.

Adapun yang menjadi tujuan kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP ini adalah:

- Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal KSDAE;
- Merumuskan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP dalam periode waktu tertentu dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP lingkup DIrektorat Jenderal KSDAE;

- c. Mengkomunikasikan kondisi maturitas pengendalian intern kepada stakeholders internal dan eksternal.
- d. Meningkatkan kesadaran lingkup Direktorat Jenderal KSDAE tentang pentingnya peningkatan efektivitas pengendalian intern dalam rangka pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penilaian atas penyelenggaraan SPIP terintegrasi ini dilakukan atas Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Daerah.

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Direktorat Jenderal KSDAE melaksanakan kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem (SPIP) Tahun 2021. Kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP ini dilaksanakan dengan rentang waktu pengukuran bulan Juli tahun 2021-Juni tahun 2022, yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu: 1. Persiapan, 2. Pelaksanaan, dan 3. Pelaporan. Untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan kegiatan ini Direktorat Jenderal KSDAE telah membentuk Tim Penilaian Mandiri Maturitas Nomor: SK 159/KSDAE/SET.3/KEU.1/8/2022 tentang Tim Penilaian Maturitas Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

Direktorat Jenderal KSDAE telah menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan diantaranya melalui sosialisasi awal SPIP dan reviu atas tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP, diskusi kepada assessor, pengumpulan dan pengujian bukti dokumen atas pelaksanaan 25 sub unsur SPIP, reviu peta risiko dan analisis risiko, pelaksanaan wawancara dan observasi. Setelah seluruh tahapan tersebut dilaksanakan, sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Daerah Direktorat Jenderal KSDAE melakukan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Tahun 2022 dan setelah itu akan dilaksanakan Penjaminan Kualitas oleh Inspektorat Jenderal KLHK, kemudian hasil dari seluruh Eselon I akan dikompilasi dan dilakukan Penilaian Maturitas untuk nilai Maturitas lingkup KLHK.

Hasil yang dipergunakan sebagai Nilai Maturitas Eselon I tahun 2022 diambil nilai hasil evaluasi penilaian mandiri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan

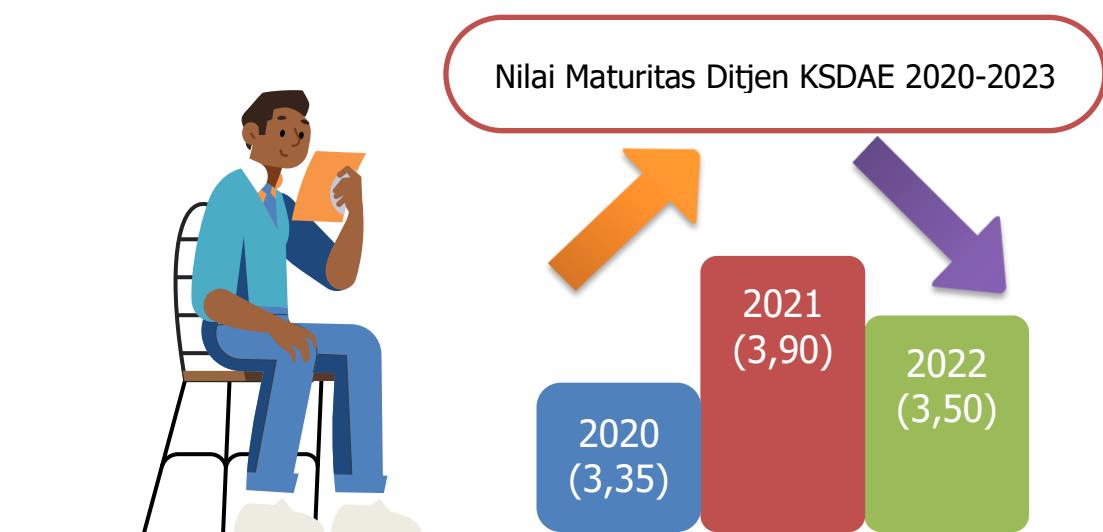
Pembangunan (BPKP). Berdasarkan surat Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Nomor PE.09.03/S-1053/D1/2/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang hasil evaluasi penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) tahun 2022, bahwa :

- a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,50 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (tiga).
- b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,36 atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Level 3 (tiga).
- c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 3,22.

Hasil evaluasi penilaian mandiri maturitas SPIP KLHK oleh BPKP terdapat beberapa catatan dalam penilaian yaitu:

- a. Adanya penyesuaian penilaian terkait penetapan tujuan dan capaian level output serta outcome dengan metode benchmarking skor hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja dan Skor Reformasi Birokrasi.
- b. Resiko level strategis pada unit kerja belum terdefinisi dengan baik.
- c. Implementasi kegiatan anti korupsi masih bersifat insidental dan belum diterapkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan nilai maturitas SPIP sebesar 3,5 maka realisasi nilai maturitas SPIP masuk pada level 3 jika dibandingkan dengan target level 3, capaian pada indikator kinerja maturitas SPIP adalah sebesar **100%**. Berikut merupakan tren capaian Level Maturitas SPIP Ditjen KSDAE.



Capaian Rencana Kerja Setditjen KSDAE 2022

Layanan Perkantoran

Gaji dan Tunjangan	Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai (ASN) sebanyak 3.783 pegawai / 9.872 jiwa selama 12 bulan terhitung mulai Januari sd Desember 2022 (lingkup Kantor Pusat Ditjen KSDAE).
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	<ol style="list-style-type: none">1. Pembayaran tenaga PPNPN lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal KSDAE sebanyak 112 orang.2. Pembayaran honor.3. Operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 27 unit dan roda 2 sebanyak 20 unit.4. Penanganan pandemi Covid 19 dalam bentuk tes swab lingkup Kantor Pusat Ditjen KSDAE, penyemprotan disinfektan di lingkungan Kantor Pusat, pembelian masker dan pembelian hand sanitizer.5. Pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran berupa Komputer , AC, Printer dan Laptop.6. Pemeliharaan gedung dan bangunan pada kantor Setditjen KSDAE yang berada di Gedung Manggala Wanabakti dan di Bogor.7. Operasional perkantoran lainnya yang meliputi langganan listrik, langganan air, langganan telepon, sewa fotocopy, langganan internet, langganan penyimpanan data berbasis <i>cloud</i>, dan langganan aplikasi <i>video conference</i>.8. Pengadaan obat-obatan dan bahan Poliklinik.



Layanan Umum

Penyusunan Program, Anggaran, Evaluasi, Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep Renja Ditjen KSDAE 2023 dan Renja Setditjen KSDAE 2023 - Dokumen RKA-K/L TA 2023 (75 satker) - Pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan khusus (SBSN, HLN, IKN) - Proses revisi anggaran lebih efektif. - Laporan Kinerja Ditjen KSDAE 2021 dan Setditjen KSDAE 2021 - Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Ditjen KSDAE 2022 - Monitoring dan evaluasi kegiatan tematik 2022 - Buku Statistik Ditjen KSDAE Tahun 2021 - Pemutakhiran website Ditjen KSDAE (www.ksdae.menlhk.go.id) - Bimtek SIDAK dan Sitroom Ditjen KSDAE - Pengembangan dashboard SIM
Hukum dan Kerjasama Teknik	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama bersifat Internasional - Terbentuknya Pokja GEF - Fasilitasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri - Penanganan Perkara Perdata dan Perkara TUN - Asistensi Penyelesaian Kasus-Kasus Bidang KSDAE - Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Advokasi Hukum - Tersusunnya NA dan DIM RUU KSDAHE - Tersusunnya 3 Draft Final PermenLHK tematik - Tersusunnya Instruksi Menteri LHK tentang Perlindungan Satwa Liar atas ancaman penjeratan dan perburuan di dalam dan di luar kawasan hutan - Tersusunnya SOP perlindungan satwa liar di dalam dan di luar kawasan hutan - Evaluasi 41 PermenLHK bidang KSDAHE
Pengelolaan Kepegawaian, Jabfung, dan Ortala	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan PPNPN lingkup Ditjen KSDAE dengan hasil sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> Berpeluang PPPK : 1.117 orang Outsourcing : 515 orang Belum ada solusi : 2.031 orang (tidak menduduki jabatan outsourcing, pendidikan tidak berpeluang PPPK) - Tahun 2022 Ditjen KSDAE mendapatkan alokasi formasi tenaga PPPK sejumlah 683 orang. - Tahun 2022 sejumlah 213 orang PNS telah diambil Sumpah PNS nya, terdiri dari 203 orang PNS Ditjen KSDAE, 9 orang dari Badan Penerapan Standar Instrumen LHK Solo dan 1 orang dari Badan PDAS Solo.

Layanan Umum

- Menelaah usul pemberian tugas belajar sebanyak 3 Usul SKTB dan 39 usul seleksi TB
- Menelaah dan menyiapkan konsep 85 SK izin belajar mandiri dan 53 SK perpanjangan Izin Belajar
- Menyiapkan usul Ujian Dinas sebanyak 169 orang dan ujian /PI/PG/GI sebanyak 53 orang
- Terbitnya PermenLHK No. 17 tahun 2022 jo. PermenLHK No. 22 Tahun 2022 tentang Perubahan pertama PermenLHK No 17 Tahun 2022 tentang OTK UPT Ditjen KSDAE
- Tersusunnya peta proses bisnis pusat dan UPT

Pengelolaan Keuangan dan Umum

- Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Lingkup Ditjen KSDAE Triwulan III Tahun 2021 bersama K/L terkait
- Monitoring Tindak Lanjut LHA BPK RI, BPKP dan Itjen lingkup Ditjen KSDAE
- Monitoring Tindak Lanjut Kerugian Negara dan Pengelolaan Hibah
- Penatausahaan Persuratan dan Arsip Setditjen KSDAE
- Penataan arsip dan penghapusan non arsip lingkup Setdijen KSDAE
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara
- Penanganan Kasus BMN dan Penyelesaian Permasalahan BMN
- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BMN
- Penyelenggaraan Penghapusan/Pemindahtanganan BMN

Layanan Sarana Internal

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

-

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

- Pengadaan Peralatan Setditjen

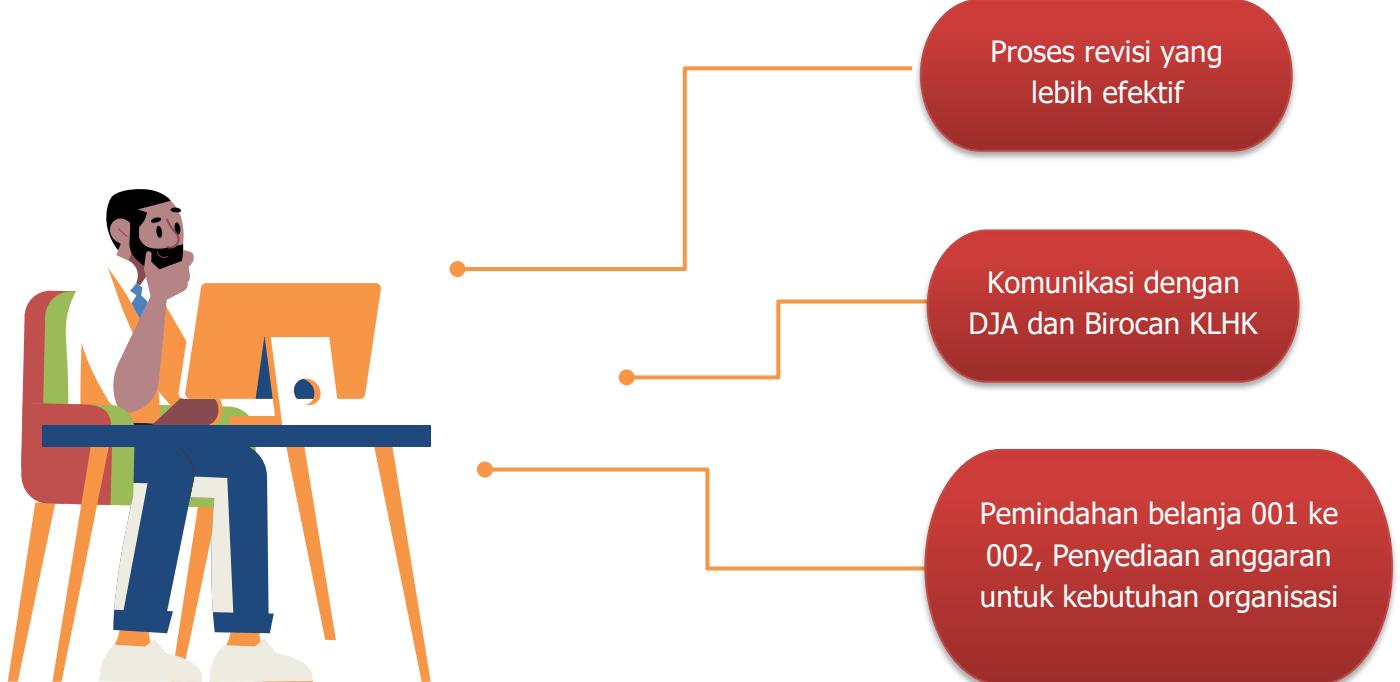
Layanan Prasarana Internal

Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan

- Penataan Ruangan Ditjen KSDAE

Beberapa capaian Tim Kerja Setditjen KSDAE:

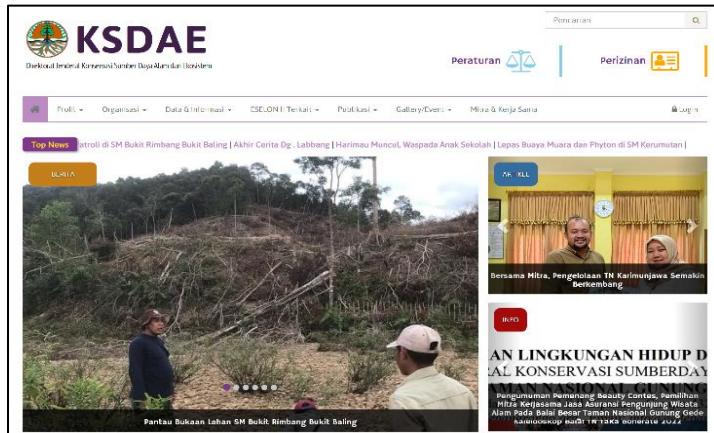
- Tim Kerja Program Anggaran:



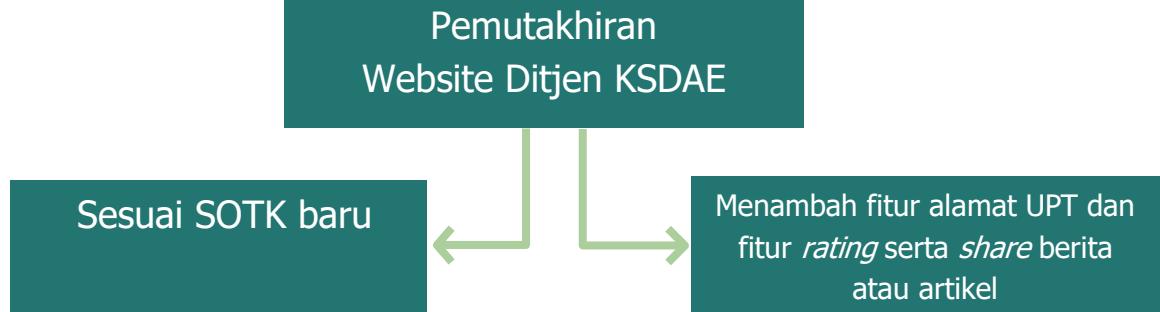
- Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan:



➤ Tim Kerja Data dan Informasi:



Pemutakhiran Website Ditjen KSDAE



➤ Tim Kerja Keuangan, Tim Kerja LHP dan Tim Kerja BMN:

Laporan Keuangan TW III Tahun 2022 UAPPA E1 dan UAKPA



Penyelesaian 128 rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI



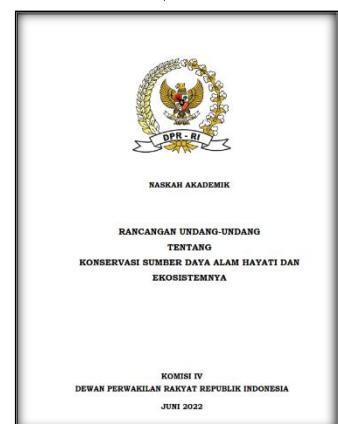
Penyelesaian Proses penghapusan Barang Milik Negara berupa Sistem Komunikasi Radio Terpadu/ SKRT pada 26



- Tim Kerja Pertimbangan Advokasi Hukum, Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan dan Tim Kerja Kerjasama Teknik:

Tahun 2022

Tersusunnya Naskah Akademik dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang KSDAHE.



DAFTAR INVENTARISASI MASALAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

TAHUN 2022

Tahun 2022

Penanganan Perkara perdata (7 Perkara) dan Penanganan Perkara TUN (4 Perkara)



Tahun 2022

Terlaksananya Evaluasi MSP KLHK-FFI dan Monev Kerjasma bersifat Internasional

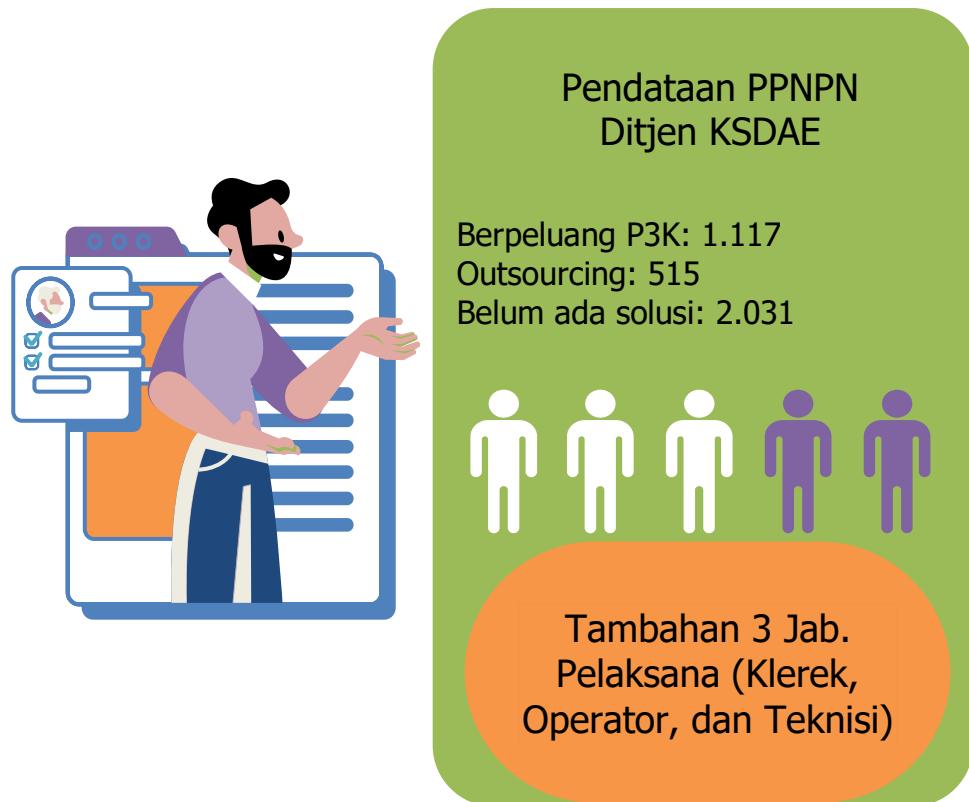


EVALUASI MSP KLHK-FFI
PERIODE 2020-2023

Laporan hasil evaluasi

Kerja Sama Teknik 23 September 2022

- Tim Kerja Administrasi Kepegawaian:



- Tim Kerja Tata Usaha:

Sosialisasi Persiapan
Penerapan SRIKANDI
sekaligus ujicoba
awal Tahun 2022

NASKAH DINAS
Total status naskah keluar dan naskah masuk pada menu "NASKAH DINAS".

NASKAH KELUAR	NASKAH MASUK
0 Naskah yang belum Diterbitkan	0 Naskah yang belum dibentuk Tanda Tangan
0 Naskah yang belum Diterbitkan	234 Naskah masuk yang belum Diterbitkan

LOG NASKAH
Total status naskah keluar dan naskah masuk pada menu "LOG NASKAH".

NASKAH KELUAR	NASKAH MASUK
0 Naskah yang belum Diterbitkan	0 Naskah yang belum Diterbitkan
0 Naskah yang belum dibentuk Tanda Tangan	0 Naskah yang belum Diterbitkan
0 Naskah yang belum Diterbitkan	16 Naskah yang belum Diterbitkan

➤ Tim Kerja Organisasi dan Tata Laksana:

Berkontribusi atas tersusunnya PermenLHK 25 Tahun 2022, PermenLHK 24 Tahun 2022 dan KepmenLHK SK.717 Tahun 2022



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PROSES BISNIS KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK.717/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2022

TENTANG

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;

b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

c. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.946/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2019 tentang Hasil Analisis Beban Kerja Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum sehingga perlu disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

➤ Tim Kerja Administrasi Jabatan Fungsional:

pengolahan bahan penyiapan pengembangan pendidikan, penyiapan pengembangan AJF, dan pengembangan pelatihan



- ✓ Usulan tugas belajar dan ujian dinas
- ✓ Usulan Kenaikan Pangkat dan Penilaian DUPAK
- ✓ Usulan Diklat dna uji kompetensi



@BTN Gn Ciremasi
Wisata Alam Lambosir

CAPAIAN TEMATIK DITJEN KSDAE 2022

Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal KSDAE mendapatkan mandat untuk turut berperan dalam mensukseskan kegiatan yang dipantau Kantor Staf Presiden (KSP) yaitu kegiatan Kebijakan kelautan Indonesia 2022. Selain itu terdapat pemantauan kegiatan aksi tematik KemenLHK yaitu Padat Karya, Prioritas Nasional, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Pembangunan Kawasan Perbatasan, Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat, serta Kegiatan Ibu Kota Negara (IKN).

Pemantauan Kantor Staf Presiden:

Kegiatan Kebijakan Kelautan Indonesia 2022:

- Dasar Pemantauan : Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 berdasarkan Peraturan Presiden No 34 Tahun 2022.
- Ukuran Keberhasilan: Berkembangnya wisata alam bahari pada kawasan konservasi
- Capaian: Jumlah destinasi wisata alam bahari Ditjen KSDAE di 3 lokasi yaitu:
 - a. BTN Wakatobi (Penataan Bangunan Pelayanan Pengunjung)
 - b. BTN Bunaken (Pengadaan Kapal (Pelang) Pengawasan Wisata dan Pemeliharaan Sarana Mangrove Trail Wisata di Pulau Mantehage)
 - c. BTN Takabonerate (Pembangunan Wisma Tinabo).

Aksi Tematik KemenLHK:

Kegiatan Padat Karya:

- Dasar Pemantauan : Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor: S.139/ROCAN/PK/SET.1/3/2022 tanggal 30 Maret 2022 perihal Konfirmasi Identifikasi Anggaran Kegiatan Padat Karya TA.2022.
- Ukuran Keberhasilan: Pelaksana program Padat Karya pada Ditjen KSDAE adalah 74 UPT yang terdiri dari 26 UPT KSDA dan 48 UPT Taman Nasional dengan kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung.
- Capaian: Kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung di 74 UPT lingkup Ditjen KSDAE dengan kegiatan pelaksanaan yaitu:
 - a. Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi telah terlaksana sebanyak 52.057 HOK.
 - b. Pengendalian Kebakaran Hutan telah terlaksana sebanyak 15.277 HOK.
 - c. Pemulihan Ekosistem meliputi Penanaman Intensif, Pemeliharaan, Rehabilitasi Terumbu Karang, Pengendalian Jenis Invasif, dan Penanaman pengkayaan bersama masyarakat mencapai 28.799 HOK.

Kegiatan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim:

- Dasar Pemantauan : Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. UPT Ditjen KSDAE yang berpartisipasi dalam program ini sebanyak 42 UPT yang terdiri pada 18 UPT KSDA dan 24 UPT Taman Nasional.
- Ukuran Keberhasilan: pemberian bantuan kepada masyarakat desa di sekitar kawasan konservasi berupa bantuan usaha ekonomi produktif yang dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat
- Capaian: Sudah terlaksana pemberian bantuan kepada masyarakat desa sekitar kawasan di 42 UPT Ditjen KSDAE tahun 2022.

Kegiatan pelaksanaan Program Prioritas Nasional:

- Dasar Pemantauan: Rencana strategis KemenLHK 2020-2024
- Ukuran Keberhasilan: Tercapainya Program Nasional 2022
- Capaian: Tercapainya realisasi anggaran dan kinerja Ditjen KSDAE pada PN 1, PN 2, dan PN 3.

Kegiatan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Pembangunan Kawasan Perbatasan:

- Dasar Pemantauan: Pasal 15 UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah negara dan Pasal 3 Perpres No. 12 Tahun 2010, Perpres 44 Tahun 2017 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
- Ukuran Keberhasilan: Mendukung rencana pemerintah dalam rangka efektifitas Pengelolaan Perbatasan Negara sebagai halaman depan Negara yang berdaulat, berdaya saing dan aman.
- Capaian: tercapainya kegiatan perbatasan baik bantuan masyarakat, pembangunan dan patroli.

Kegiatan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat:

- Dasar Pemantauan: Inpres 9 tahun 2020
- Ukuran Keberhasilan: Mendukung Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk pembangunan berkelanjutan, pelestarian alam dan keanekaragaman hayati di Wilayah Pulau Papua, baik Visi Papua dan Visi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi.
- Capaian: Pelaksanaan melalui kegiatan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL di 5 UPT (BBKSDA Papua, BBKSDA Papua Barat, BBTN Teluk Cendrawasih, BTN Lorentz, BTN Wasur)

Kegiatan Ibu Kota Negara (IKN):

- Dasar Pemantauan : Rencana strategis KemenLHK 2020-2024
- Ukuran Keberhasilan: Nilai kehati tinggi pada kawasan IKN dan Pemulihan Ekosistem di area IKN.
- Capaian: Tercapainya nilai kehati tinggi pada kawasan IKN seluas 20.448,50 Ha dan Pemulihan Ekosistem di area IKN seluas 500 Ha.

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2022 sebesar 72.466.355.000. Dalam perjalanan anggaran tahun 2022, pagu anggaran Kantor Pusat mengalami 14 kali revisi anggaran (5 di Kanwil dan 9 di DJA), sebagaimana tabel dibawah ini:

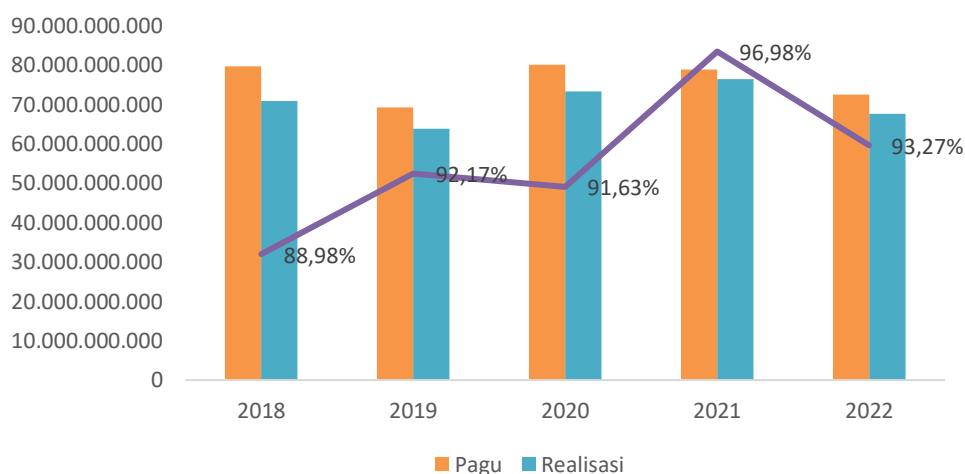
Tabel 6. Pagu dan realisasi anggaran Setditjen KSDAE 2022

No	Rincian Output	Komponen	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Layanan Umum	Penyusunan Program, Anggaran, Evaluasi, Data dan Informasi	5.803.286.000	5.792.240.069	99,81
		Hukum dan Kerjasama Teknik	2.897.111.000	2.886.552.408	99,64
		Pengelolaan Kepegawaian, Jabfung, dan Ortala	2.646.121.000	2.614.800.290	98,82
		Pengelolaan Keuangan dan Umum	4.278.124.000	4.241.174.078	99,14
2	Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	42.664.949.000	38.647.195.367	90,58
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	11.487.851.000	10.750.685.060	93,58
		- Belanja Operasional Ditjen dan Setditjen KSDAE	11.487.851.000	10.750.685.060	93,58
3	Layanan Sarana Internal	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	0	
		Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	543.000.000	538.293.000	99,13
		- Pengadaan Peralatan Setditjen	543.000.000	538.293.000	99,13
4	Layanan Prasarana Internal	Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	2.145.913.000	2.117.750.051	98,69
		- Penataan Ruangan Ditjen KSDAE	2.145.913.000	2.117.750.051	98,69
JUMLAH			72.466.355.000	67.588.690.323	93,26

Sumber: Aplikasi Sakti Kantor Pusat Ditjen KSDAE, Januari 2023

Sampai dengan akhir tahun 2022, realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE adalah sebesar Rp.67.588.690.323,- atau sebesar 93,26%. Berdasarkan komponen kegiatan yang dilaksanakan, realisasi Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE yang tertinggi adalah komponen Pengelolaan Kepegawaian, Jabfung dan Ortala sebesar 99,82%, dan diikuti oleh komponen Penyusunan Program, Anggaran, Evaluasi, Data dan Informasi sebesar 99,81%. Realisasi terkecil yaitu komponen Gaji dan Tunjangan sebesar 90,58%, hal ini disebabkan karena tidak terealisasinya pembayaran tunjangan kinerja 13 dan perpindahan pegawai karena promosi dan alih tugas.

Pagu dan Realisasi 5 Tahun Terakhir



Nilai kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE berada pada angka 100,5% yang diperoleh dari 3 capaian indikator kinerja yaitu nilai SAKIP 100,15%, Opini WTP atas Laporan Keuangan 100% dan level maturitas SPIP 100%. Apabila angka capaian kinerja disandingkan dengan realisasi anggaran sebesar 93,26% maka diperoleh nilai rasio efisiensi sebesar 0,93. Angka ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam pencapaian target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal dalam mendukung tata kelola Direktorat Jenderal KSDAE dipandang efisien.

Nilai Kinerja Anggaran Kantor Pusat Ditjen KSDAE yaitu 83,91. Nilai kinerja anggaran merupakan gabungan dari nilai evaluasi kinerja anggaran dari aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (Smart) dengan bobot 60 persen serta nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) dengan bobot 40 persen.

BAB IV

PENUTUP

1. Kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Daya Alam dan Ekosistem tahun 2022, didapatkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Daya Alam dan Ekosistem tahun 2022 sebagai berikut :
 - a. Nilai SAKIP Ditjen Konservasi Sumberdaya Daya Alam dan Ekosistem, terealisasi **79,12** (kategori **BB : Sangat Baik**), dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan 100,00%
 - b. Level Maturitas SPIP Ditjen Konservasi Sumberdaya Daya Alam dan Ekosistem, terealisasi Level 3 dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan 100,00%.
 - c. Laporan Keuangan Ditjen Konservasi Sumberdaya Daya Alam dan Ekosistem yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, terealisasi 1 Laporan dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan 100,00%.
2. Pelaksanaan ketiga indikator tersebut dituangkan pada 3 output kegiatan yaitu layanan dukungan manajemen Eselon I, layanan sarana dan prasarana internal, dan layanan perkantoran. Layanan dukungan manajemen Eselon I pada Sekretariat Ditjen KSDAE, dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, data dan informasi, administrasi kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan, kerjasama kemitraan, peraturan perundangan-undangan, pertimbangan dan advokasi hukum, administrasi keuangan, ketatausahaan
3. Dengan tercapainya ketiga indikator kinerja kegiatan tersebut, kegiatan Dukungan Manajemen pada Sekretariat Ditjen KSDAE dapat dikatakan telah dapat mendukung terwujudnya sasaran reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen KSDAE.
4. Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Daya Alam dan Ekosistem tahun 2022 sebesar Rp. 72.466.355.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 67.588.690.323,- (93,26%).
5. Nilai Efisiensi Setditjen KSDAE 2022 sebesar 0,93, hal ini menunjukan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja Setditjen KSDAE sudah efisien.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Setditjen KSDAE 2022:

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suharyono, S.H., M.Si., M.Hum
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Selanjutnya disebut pihak pertama

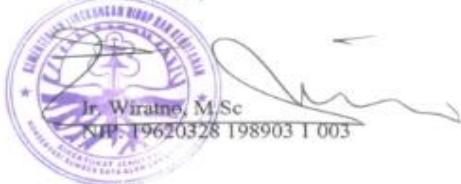
Nama : Ir. Wiratno, M.Sc
Jabatan : Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua,



Ir. Wiratno, M.Sc
NIP. 19620328 198903 1 003

Pihak Pertama,



Suharyono, S.H., M.Si., M.Hum
NIP. 19670401 199403 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN KERJA

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Unit Satuan Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET IKK	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	RINCIAN OUTPUT (RO)
1	Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	1. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (SAKIP) Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 80,00 (Poin) 2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan (Opini WTP) 3. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level SPIP)	1. 79 Poin 2. 1 Opini WTP 3. SPIP Level 3	5419.EBA.1 Layanan Dukungan Manajemen Internal 5419.EBA.962 – Layanan dan Prasarana Internal 5419.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	5419.EBA.962 – Layanan Umum 5419.EBA.962 – Layanan Perkantoran 5419.EBB.951 – Layanan Sarana Internal 5419.EBB.971 – Layanan Prasarana Internal

Kegiatan :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

Anggaran :

Rp.93.765.624.000,-

Jakarta, Januari 2022

Sekretaris Direktorat Jenderal,


* I. Wiratno, M.Sc.
NIP. 19620528 198903 1 003


Subarsono S.H., M.Si., M.Hum
NIP. 19670401 199403 1 003

**RENCANA AKSI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN KERJA**

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
 Unit Satuan Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
			4	5	6	7
1.	Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE 80 poin	Tahapan: 1. Persiapan data dukung penilaian SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE 2. Penilaian SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE oleh Tim Inspektorat Jenderal	79 Poin	79 Poin	79 Poin
	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan	Tahapan: 1. Konsolidasi dan Telaah Data Transaksi Keuangan Lingkup Ditjen KSDAE Semester I Tahun 2022 2. Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Setditjen KSDAE Semester I 2022 3. Pembinaan Keuangan kepada UPT Lingkup Ditjen KSDAE	Tahapan: 1. Konsolidasi dan Telaah Data Transaksi Keuangan Lingkup Ditjen KSDAE Triwulan III Tahun 2022 2. Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Setditjen KSDAE Triwulan III 2022 3. Pembinaan Keuangan kepada UPT Lingkup Ditjen KSDAE	Tahapan: 1. Konsolidasi dan Telaah Data Transaksi Keuangan Lingkup Ditjen KSDAE Triwulan III Tahun 2022 2. Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Setditjen KSDAE Triwulan III 2022 3. Pembinaan Keuangan kepada UPT Lingkup Ditjen KSDAE	Opini WTP: 1 Tahapan: 1. Konsolidasi dan Telaah Data Transaksi Keuangan Lingkup Ditjen KSDAE Triwulan III Tahun 2022 2. Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Setditjen KSDAE Triwulan III 2022 3. Pembinaan Keuangan kepada UPT Lingkup Ditjen KSDAE	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tahapan: 1. Penyusunan Desain SPIP yang sudah direviu oleh Itjen 2. Penyusunan Laporan pemantauan dan evaluasi triwulan I pada aplikasi SPIP online	Tahapan: 1. Pemantauan kebijakan pengendalian pada risiko signifikan pada Triwulan II 2. Penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi triwulan II	Tahapan: 1. Pemantauan kebijakan pengendalian pada risiko signifikan pada triwulan III 2. Penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi triwulan III 3. Persiapan data dukung penilaian maturitas SPIP Ditjen KSDAE	Level SPIP: 3 Tahapan: 1. Pemantauan kebijakan pengendalian pada risiko signifikan pada triwulan IV 2. Penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi triwulan IV serta laporan penyelenggaraan SPIP tahun 2022. 3. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2022 Ditjen KSDAE meliputi Penilaian Mandiri oleh Eselon I, Penilaian Penjaminan Kualitas (PK) oleh Inspektorat KLHK, dan Evaluasi oleh BPKP atas hasil PK oleh Inspektorat.

Jakarta, Januari 2022

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Subaryono, S.H., M.Si., M.Hum
NIP. 19620401 199403 1 003

“

**MELAYANI SEPENUH HATI
UNTUK KSDAE HEBAT**

“

**KONSEVASI ALAM TAK
MUNGKIN SENDIRI**





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

**Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan. Jakarta, 10270
Telp. (021) 573-3437,**